



## # 5

# Narasi Emik Proses Regsosek di Provinsi Gorontalo

*Sahajuddin & Risyanto*

## A. Membuka Tabir Lama Daerah Pemekaran: Pengantar

Kebutuhan satu data (Data Terpadu) untuk implementasi program-program perlindungan sosial secara nasional tentu sangat penting, mendesak, dan menjadi keharusan. Dilatarbelakangi oleh masih terjadinya tumpang tindih antarprogram perlindungan sosial, BPS RI mendapatkan mandat melaksanakan Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek). *Output* dari kegiatan Regsosek diharapkan mampu menjadi basis data (rujukan) untuk implementasi program-program perlindungan sosial ke depannya yang lebih tepat sasaran.

Program perlindungan sosial dan pemberdayaan masyarakat sudah sering kita dengar dan ketahui melalui berbagai macam media. Implementasi dari kedua program intervensi pemerintah itu

---

Sahajuddin & Risyanto

Badan Riset dan Inovasi Nasional, Jakarta, *e-mail*: saha004@brin.go.id

© 2023 Badan Riset dan Inovasi Nasional

Sahajuddin & Risyanto. (2023). Narasi emik proses regsosek di Provinsi Gorontalo. Dalam M. A. Humaedi., D. K. Imron, & A. Pramono (Ed.), *Mencatat untuk Membangun Negeri Narasi Emik Registrasi Sosial Ekonomi Jilid 1 Indonesia Tengah-Timur* (165–213). Penerbit BRIN. DOI: 10.55981/brin.775.c698 ISBN: 978-623-8052-94-3 E-ISBN: 978-623-8052-98-1

juga sering didengar informasinya, baik informasi keberhasilannya maupun informasi kegagalannya, baik di tingkat pusat secara nasional maupun di tingkat lokal di daerah yang memiliki kerentanan sosial ekonomi dan *subsistensi* kemiskinan. Sementara itu, kementerian dan lembaga yang memiliki fungsi perlindungan sosial dan pemberdayaan masyarakat terhitung sangat banyak.

Program intervensi dari berbagai kementerian dan lembaga sama-sama mengklaim dirinya bahwa lembaganya cukup berhasil dalam program tersebut. Tetapi mereka tidak sadar bahwa program itu secara tidak langsung menciptakan ego sektoral yang selama ini akut. Sama-sama melakukan pendataan, sama-sama melakukan intervensi perlindungan sosial dan pemberdayaan masyarakat sehingga terjadi tumpang tindih kebijakan program intervensi dan tumpang tindih penggunaan anggaran negara. Menurut salah seorang yang sempat diwawancarai, pelaksanaan pendataan atau pencacahan penduduk seluruh Indonesia bisa menghabiskan uang negara hingga triliunan rupiah (Wawancara dengan Kepala BPS Kab. Gorontalo, 2 November 2022).

Jika ada beberapa kementerian dan lembaga melakukan hal yang sama, berapa triliun uang negara habis hanya untuk pendataan saja? Akibatnya, hampir setiap tahun program-program intervensi ini mendapat kritikan dari berbagai pihak karena dianggap banyak yang tidak tepat sasaran. Kemudian, muncul ide Regsosek yang bertujuan untuk membangun data sosial ekonomi tunggal atau Satu Data. Dengan menggunakan data tunggal, pemerintah melalui kementerian dan lembaganya dapat melaksanakan berbagai program secara terintegrasi, tidak tumpang tindih, dan lebih efisien. Ide ini adalah ide yang luar biasa. Namun, muncul pertanyaan lainnya, ide ini muncul apakah bukan ide sektoral dan bukan sekadar pencacahan belaka untuk mengucurkan anggaran negara hingga puluhan triliun?

Pada tahun 2023 dilakukan integrasi pengolahan dan pemeringkatan pendataan, pemanfaatan data oleh pemda, integrasi data

lintas sektor secara bertahap, dan pembaruan data melalui Digital Monografi Desa/Kelurahan. Dengan demikian, akan segera terwujud stabilitas sistem pada tahun 2024 untuk terbentuknya pusat data nasional, terbangunnya mekanisme kontrol kualitas dan penargetan, serta aktivitas *monitoring* dan evaluasi yang terintegrasi. Hasil Regsosek akan menyajikan peringkat kesejahteraan tiap penduduk. Pengelolaan data hasil Regsosek dilakukan dengan prinsip integritas dan interoperabilitas sehingga hasilnya diharapkan dapat dimanfaatkan secara luas oleh para pengambil kebijakan (Hasil olahan data wawancara kepada Kepala BPS Provinsi Gorontalo dan Kepala BPS Kabupaten Gorontalo, serta data *online* BPS, dan data *online* Antara Gorontalo, 2022).



Foto: Sahajuddin, 2022

**Gambar 5.1** Wawancara dengan Kepala BPS Provinsi Gorontalo

Pendataan Regsosek di Provinsi Gorontalo, pada umumnya, dan Kabupaten Gorontalo, pada khususnya, dilihat dari dukungan pemerintah dan masyarakat; dilihat dari cerita emik keunikan salah satu desa yang menjadi sasaran Regsosek; cerita dan pengalaman para petugas lapangan Regsosek; dan kisah salah satu keluarga yang berhasil didata dalam kegiatan Regsosek. BPS RI bekerja sama dengan BRIN mencoba melihat dari sisi lain kegiatan awal pendataan Regsosek. Kegiatan ini dilaksanakan di 16 provinsi, dengan maksud mendokumentasikan kegiatan Regsosek (proses dan dinamika di lapangan) dalam bentuk narasi emik.



Foto: Sahajuddin, 2022

**Gambar 5.2** Wawancara dengan Kepala BPS Kabupaten Gorontalo

## **B. Bentang Alam Tersulit, Tanpa Menyerah**

Provinsi Gorontalo dengan lima kabupaten dan satu kota adalah provinsi pemekaran dari Provinsi Sulawesi Utara. Gorontalo adalah sebuah provinsi di Indonesia yang terletak di bagian utara Pulau Sulawesi. Provinsi Gorontalo lahir pada tanggal 5 Desember 2000 berdasarkan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000. Kota Gorontalo ditetapkan sebagai ibu kota Provinsi Gorontalo, sekaligus menjadi pusat pemerintahan, pusat ekonomi, dan pusat perdagangan terbesar di kawasan Teluk Tomini. Adapun jumlah penduduk Provinsi Gorontalo sebanyak 1.171.681 jiwa (BPS, 2020), dengan laju pertumbuhan penduduk sebesar 1,16% setiap tahunnya.

Pada awalnya, daerah Gorontalo berbentuk kerajaan-kerajaan yang diatur menurut hukum adat ketatanegaraan Gorontalo. Kerajaan-kerajaan itu tergabung dalam satu ikatan kekeluargaan yang disebut *Pohala'a*. Menurut Haga (1931), di daerah Gorontalo ada lima *Pohala'a*. Apabila dilihat dari struktur fisik orang Gorontalo, suku Gorontalo termasuk ke dalam ras mongoloid, hanya saja mungkin sejak beberapa abad yang lalu telah terjadi percampuran ras dengan bangsa-bangsa lain. Provinsi Gorontalo dihuni oleh ragam etnis yang berbentuk *Pohala'a* (Keluarga), di antaranya *Pohala'a* Gorontalo (etnis Hulontalo), *Pohala'a* Suwawa (etnis Suwawa/Tuwawa), *Pohala'a*

Limboto (etnis Limutu), *Pohala'a* Bolango (etnis Bulango/Bolango) dan *Pohala'a* Atinggola (etnis Atinggola).

Jika Aceh memiliki julukan kota Serambi Mekkah, Provinsi Gorontalo memiliki julukan Serambi Madina. Julukan tersebut terkait dengan nilai-nilai yang dianut oleh sebagian besar masyarakat Gorontalo. Sebutan Gorontalo sebagai Kota Serambi Madinah tidak lain karena sebagian besar masyarakat di Provinsi Gorontalo memeluk agama Islam. Nilai-nilai keislaman juga menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan masyarakat serta budaya setempat. Kearifan lokal nilai-nilai itu telah tertanam sejak zaman kerajaan. Dilansir dari karya ilmiah "Islam, Budaya, dan Lokalitas Gorontalo", karya Basri Amin, disebutkan bahwa Raja Amai (1523–1550) adalah peletak dasar Islam di Gorontalo.

Menteri LHK, Dr. Ir. Siti Nurbaya Bakar, M.Sc, menyebutkan beberapa catatan penting tentang posisi strategis Gorontalo dalam basis sumber daya alam dan mempertegas langkah dalam konservasi alam (Biro Humas KLHK, 2016). Beliau mengatakan, Gorontalo adalah contoh sebuah negeri maritim dan agraris yang bertemu dalam satu ruang. Daerah ini juga menjadi rumah bagi jantung keanekaragaman hayati serta menyimpan cadangan air tanah yang luar biasa besar.

Beberapa kondisi terlihat akibat perubahan iklim, seperti berkurangnya wilayah daratan, rusaknya ekosistem pesisir akibat gelombang pasang, dan berkurangnya areal persawahan dataran rendah di dekat pantai. Semuanya akan berdampak pada hilangnya mata pencaharian dan ketahanan pangan.

Menteri Siti juga menegaskan perwujudan Gorontalo sebagai Provinsi Konservasi. Terdapat beberapa areal konservasi, seperti Taman Nasional Bogani Nani Wartabone, Suaka Margasatwa Nantu-Boliyohuto, Cagar Alam Panua, dan Cagar Alam Tanjung Panjang. Selain itu ada Cagar Alam Mas Popaya Raja dan Cagar Alam Tangale. "Saya ucapkan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya untuk Gorontalo sebagai Provinsi Konservasi. Pembangunan dan konservasi bisa berdampingan untuk keperluan generasi akan datang," ujarnya. Dengan pendekatan konservasi guna menjaga kekayaan alam,

Gorontalo diproyeksikan akan maju pada sektor pariwisata, energi, dan pelestarian budaya.

Menurunkan pengetahuan dan wawasan seperti ini, kata Menteri Siti, sangat perlu dari generasi ke generasi. Tujuannya agar terpelihara komponen dan interaksi pembentuk bentang alam, pembentuk ekosistem. “Manusia menjadi bagian penting dalam proses pembentukan bentang alam atau sebagai *land forming factors*,” katanya.



Sumber: Google Maps (2022)

**Gambar 5.3** Peta Wilayah Provinsi Gorontalo

Desa Pinogu secara administratif masuk ke dalam wilayah Kabupaten Bone Bolango, Provinsi Gorontalo. Luas wilayah Kecamatan Pinogu 406,78 km<sup>2</sup> yang terbagi ke dalam lima desa, yaitu Pinogu Induk, Bangiyo, Pinogu Permai, Dataran Hijau, dan Tilongkabila. Masyarakat Pinogu hidup secara sederhana dan jauh dari kota. Akses ke Desa Pinogu yang terbilang sulit, dapat ditempuh dengan berjalan kaki melewati kawasan Taman Nasional Bogani Nani Wartabone (TNBNW) selama lebih kurang 10 jam atau menggunakan kendaraan bermotor dengan jarak tempuh sekitar 40 km dari Desa Tulabolo.

Isdomo Yuliantoro, salah satu peneliti sosiologi kehutanan di Balai Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup dan Kehutanan (BP2LHK) Manado, dalam penelitiannya di tahun 2020 menyebutkan bahwa masyarakat Pinogu sebagian besar menggantungkan hidup



Sumber: Arini & Yuliantoro (2019)

**Gambar 5.4** Bentang Alam Desa Pinogu Kabupaten Bone Bolango

dari pertanian dan pengolahan hasil hutan. “Keterbatasan akses terhadap dunia luar menjadi alasan kuat mengapa masyarakat Pinogu memiliki ketergantungan yang tinggi terhadap sumber daya hutan,” ujar Isdomo. Bentang alam Desa Pinogu terdiri dari bentangan lahan dengan pepohonan dan ruang terbuka hijau terlihat pada Gambar 5.4. Meskipun Desa Pinogu tergolong daerah sulit, pendataan awal Regsosek tetap dilaksanakan. Bagi pendata Regsosek, mendata di daerah sulit adalah bagian dari tugas sekaligus tantangan tersendiri, serta menorehkan pengalaman yang tidak terlupakan.

### **C. Proses Kegiatan Regsosek dan Dukungan Pemerintah di Gorontalo**

Berdasarkan data Kominfotik Gorontalo (Kominfotik, 2022), pendataan awal Regsosek di Gorontalo dilakukan secara serentak di 514 kabupaten/kota se-Indonesia. Di Gorontalo sendiri pendataannya dimulai dari Penjabat Gubernur, Hamka Hendra Noer. Testimoni penjabat gubernur ini menyampaikan bahwa pada tanggal 15 Oktober 2022 pagi, beliau kedatangan petugas pendata Regsosek yang didampingi langsung oleh Kepala BPS Provinsi Gorontalo, Mukhamad Mukhanif. Beliau mengimbau agar masyarakat menerima kedatangan petugas dan memberikan data yang valid sebab pendataan Regsosek

sangat penting untuk menjadi dasar dalam perencanaan program kegiatan pembangunan. Kemudian di tempat yang sama, Kepala BPS Provinsi Gorontalo menimpali pernyataan dan imbauan Gubernur Gorontalo yang mengatakan bahwa BPS Provinsi Gorontalo telah menyiapkan 2.110 petugas yang disebar di kabupaten/kota untuk mendata 379.442 keluarga. Ia berharap imbauan gubernur dapat terwujud dalam masyarakat, dan Kepala BPS juga dapat mengajak petugas untuk menjaga kualitas data.

Selain dukungan dan imbauan dari Gubernur Gorontalo, pendataan Regsosek juga mendapat dukungan dari pemerintah kabupaten/kota se-Provinsi Gorontalo, baik secara pribadi maupun secara kelembagaan negara. Juga melalui surat edaran instruksi pemerintah kabupaten/kota ke berbagai instansi daerah, termasuk kepada seluruh camat dan kelurahan/desa yang ada di bawahnya. Kegiatan Regsosek BPS Gorontalo juga mendapat dukungan penuh dari Dinas Kominfo dan Statistik (Diskominfotik) Provinsi Gorontalo yang disampaikan pada rapat koordinasi media massa terkait Regsosek pada hari Selasa 11 Oktober 2022. Kemudian di tempat yang sama, Kepala BPS Provinsi Gorontalo menyampaikan bahwa Regsosek sebagai bagian dari transformasi data secara nasional diharapkan menjadi data tunggal yang lebih akurat untuk dimanfaatkan kementerian/ lembaga mengintervensi berbagai program. Untuk itu, Kepala BPS berharap agar masyarakat menerima kedatangan petugas dengan baik dan paling penting memberikan jawaban yang benar. Membantu petugas berarti kita sudah membantu mencatat Indonesia. Kepala BPS menambahkan bahwa khusus di Provinsi Gorontalo data estimasi awal ada 379.442 keluarga yang akan disensus. Tersebar di enam kabupaten/kota, 77 kecamatan, dan 734 desa/kelurahan. BPS Gorontalo menyiapkan 2.110 petugas terdiri dari 1.601 petugas lapangan, 418 petugas pemeriksa lapangan, 91 koordinator sensus kecamatan serta 52 instruktur (Kominfotik, 2022)

BPS Gorontalo juga melakukan kerja sama dengan BPJS Ketenagakerjaan Provinsi Gorontalo. Seiring dengan ditandatanganinya perjanjian kerja sama (PKS) antara BPJS Ketenagakerjaan Cabang Gorontalo dan BPS Kabupaten/Kota di Provinsi Gorontalo tentang



kepesertaan program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM) bagi petugas pendataan aregsosok tahun 2022 dilaksanakan pada 3 Oktober 2022.

Regsosok BPS terlaksana dengan lancar didukung adanya kerja sama dan koordinasi para pihak. Lalu bagaimana proses pelaksanaan Regsosok di tingkat BPS kabupaten? Untuk kegiatan Regsosok tingkat kabupaten, peneliti memilih salah satu kabupaten di Provinsi Gorontalo, yaitu BPS Kabupaten Gorontalo. Kegiatan Regsosok BPS di kabupaten ini diarahkan pada narasi pelaksanaan Regsosok menurut pandangan BPS, mulai dari kerja sama dan koordinasinya kepada berbagai pihak, juga proses pelaksanaannya yang melibatkan ratusan mitra dalam proses pendataan.

Proses Regsosok itu dianggap menarik jika disorot proses keterlibatannya. Progres pendataan Regsosok BPS Kabupaten Gorontalo per 31 Oktober 2022 sudah mencapai 50% dan tercatat sebagai BPS kabupaten yang paling tinggi tingkat persentase capaian pendataannya. Jumlah penduduk Kabupaten Gorontalo paling tinggi tercatat di Provinsi Gorontalo. Kabupaten lain hanya berjumlah 1/3 penduduk Kabupaten Gorontalo. Berdasarkan data sebelumnya, tercatat 125.000 lebih kepala keluarga (KK), jadi ada kemungkinan bertambah sekian persen, sementara kabupaten lain hanya sekitar 50.000 yang paling tinggi KK-nya.

Kepala BPS Provinsi Gorontalo menjelaskan jalannya proses sosialisasi Regsosok. Berbagai masukan dari pemerintah daerah disampaikan Kepala BPS Provinsi Gorontalo kepada tim BRIN (Gambar 5.5). Respons masyarakat pada saat pelaksanaan Regsosok selama setengah bulan ini sangat bagus. Walaupun ada satu atau dua orang KK yang protes, itu merupakan hal yang biasa dalam kehidupan bermasyarakat dengan berbagai macam karakter dan etnis. Namun, sampai saat ini di Kabupaten Gorontalo belum ada yang protes karena pendataan yang dilakukan oleh BPS. Masyarakat sudah tahu karena BPS sudah sering melakukan pendataan dan sensus. Jadi, kalau ada pendata yang datang ke rumah penduduk dengan mengatasnamakan BPS biasanya tidak dipersulit karena sudah saling mengenal.



Sumber: Humas BPS Provinsi Gorontalo (2022)

**Gambar 5.5** Kepala BPS Provinsi Gorontalo menerangkan proses sosialisasi Regsosek kepada Penjabat Gubernur Gorontalo.

Pendataan Regsosek juga dilaksanakan kepada Gubernur Gorontalo. Gambaran ini menjadi contoh dan bentuk sosialisasi bagi masyarakat umum (Gambar 5.6). BPS dipandang sudah sering melakukan pendataan sehingga terbangun koordinasi antara BPS dan pemerintah setempat, mulai dari pejabat kabupaten dan lintas dinas, hingga koordinasinya di tingkat desa dan dusun-dusunnya. Sebelum para petugas melakukan pendataan, biasanya dilakukan verifikasi terlebih dahulu, kemudian sehari sebelum turun lapangan dilakukan koordinasi kepada desa dan kepala-kepala dusunnya. Pada tingkat pemerintah atau pejabat bupati, juga ada surat edaran yang ditujukan kepada semua dinas-dinas terkait, camat, lurah/desa hingga sampai kepada kepala-kepala dusun. Bahkan terdapat testimoni para pejabat-pejabat tersebut terkait dukungannya terhadap kegiatan regsosek.

Bentuk sosialisasi terlihat pada ruang publik berupa spanduk di ruas jalan utama (Gambar 5.7). Salah satu kegiatan Regsosek adalah memfoto rumah dan bagian-bagiannya, tetapi tidak semua rumah yang difoto, hanya keluarga yang masuk kategori atau teridentifikasi miskin atau miskin sekali. Hal ini ditetapkan berdasarkan SOP yang sudah ada. Walaupun suatu keluarga berdasarkan SOP teridentifikasi miskin atau sangat miskin, hal ini dapat berubah karena akan ada Forum Konsultasi Publik (FKP). FKP ini sebagai bentuk pengujian



Sumber: Humas BPS Provinsi Gorontalo (2022)

**Gambar 5.6** Pendataan Awal Regsosek dengan Penjabat Gubernur Gorontalo



Foto: Sahajuddin (2022)

**Gambar 5.7** Sosialisasi dan Dukungan Regsosek 2022

hasil pendataan berdasarkan peringkat sementara yang teridentifikasi miskin atau sangat miskin. Di forum itu akan dilakukan pembuktian, apalagi dalam pelaksanaannya dilakukan per desa pada tiap kecamatan dan kabupaten.

Setiap desa akan dipaparkan dan dihadiri langsung oleh kepala desa masing-masing dan disaksikan oleh tim verifikator sehingga

peringkat-peringkat itu terverifikasi. Apakah hasil kegiatan Regsosek dengan penentuan peringkatnya sesuai dengan kenyataan lapangan atau tidak. Dalam proses ini, pentingnya disediakan bukti fisik dan yang bersifat umum. Termasuk pembuktian masyarakat karena yang diundang termasuk tokoh-tokoh masyarakat. FKP rencananya akan dilaksanakan di awal tahun depan. Hasil FKP diolah dan dilakukan pemeringkatan. Artinya, bahwa semua isian dan pernyataan akan diverifikasi agar penetapan datanya makin valid dan dapat dipergunakan sebagai data tunggal untuk diintegrasikan kepada semua kementerian dan lembaga yang berkepentingan.



Foto: Sahajuddin (2022)

**Gambar 5.8** Salah Satu Kondisi Rumah Responden Regsosek 2022



Foto: Sahajuddin (2022)

**Gambar 5.9** Salah satu kegiatan Regsosek adalah memfoto rumah dan bagian rumah.

PPL melaksanakan SOP pendataan dengan mengambil foto rumah warga terdata (Gambar 5.8). Hasil gambaran di sekitar rumah didapatkan dengan izin pemilik rumah (Gambar 5.9). Beberapa warga ada pula yang tidak bersedia difoto rumahnya karena dipandang sensitif. Tindak lanjut pendataan akan di cek kembali melalui kegiatan FKP. FKP menjadi pendekatan untuk melakukan pemeringkatan kesejahteraan. BPS menyediakan data, sedangkan kegiatan perlindungan sosial dan pemberdayaan masyarakat akan diintervensi oleh kementerian dan lembaga yang berkepentingan. Kemungkinan-kemungkinan yang terjadi berdasarkan program intervensi pemerintah selama ini kaitannya dengan perlindungan sosial dan pemberdayaan masyarakat akan terpolarisasi antara yang mendapat bantuan dan yang mendapat pemberdayaan. Jika ada anggota masyarakat yang tidak jujur menyampaikan data keluarga dan data usahanya, jangan salahkan pendata jika tidak mendapat bantuan dan pemberdayaan masyarakat.

Bantuan dan pemberdayaan sangat ditentukan oleh validitas datanya. Misalnya, ada beberapa keluarga dalam satu dusun yang memiliki sapi, tetapi ada di antara mereka yang tidak jujur dan mengatakan tidak punya sapi. Ketika pemerintah melakukan program intervensi pemberdayaan bagi pemilik sapi maka rugilah yang tidak jujur menyampaikan atas kepemilikan sapi karena tidak dilibatkan dalam pemberdayaan. Di sinilah pentingnya Regsosek ini. Salah satu tujuannya adalah memperbarui data-data yang selama ini diragukan dan diperdebatkan. Bahkan ada desa-desa yang mengatakan bahwa datanya sudah diperbaharui. Namun, ketika ada bantuan yang datang, ternyata masih data-data yang lama. Hal itu terjadi karena perubahannya tidak sesuai dengan prosedur dan variabel-variabel yang tepat. Kegiatan Regsosek ini menjadi momen yang paling tepat untuk menyatukan data sebagai data tunggal yang dapat diintegrasikan kepada semua kementerian dan lembaga.

Kegiatan Regsosek ini didukung oleh pemerintah kabupaten melalui dinas-dinasnya dan camat-camat se-Kabupaten Gorontalo. Di tingkat kecamatan, BPS juga melakukan koordinasi, dan bahkan

hampir semua kecamatan di Kabupaten Gorontalo melakukan seremonial *briefing* dengan petugas-petugas lapangan sebelum melakukan pendataan secara langsung kepada masyarakat. Pada kegiatan ini sekaligus dilakukan pelepasan semua petugas lapangan Regsosek di tingkat kecamatan oleh masing-masing camat. Kegiatan seremonial seperti itu sebenarnya tidak ada dalam SOP, tetapi inisiatif masing-masing BPS untuk melakukan kerja sama dan koordinasi di tingkat kecamatan. BPS Gorontalo memiliki 26 Koseka sehingga dibentuk juga 26 posko sebagai tempat untuk berkumpul, berdiskusi, koordinasi, dan menyelesaikan masalah jika menemukan persoalan di lapangan. Tujuannya, agar pelaksanaan Regsosek dapat berjalan lancar sesuai dengan rencana dan tercapainya target data yang lengkap dan valid. Hal ini juga menandakan bahwa harapan masyarakat dan pemerintah setempat terhadap Regsosek cukup besar.

Proses pelepasan petugas dilakukan secara serempak oleh Kepala BPS Kabupaten Gorontalo (Gambar 5.10). Petugas pendata memperlihatkan antusiasme yang tinggi. Selain petugas pendata. Para petugas lapangan juga berkontribusi aktif menyosialisasikan pentingnya kegiatan Regsosek untuk kepentingan perlindungan sosial dan pemberdayaan masyarakat (Gambar 5.11). Antusias masyarakat juga terlihat dan menjadi petunjuk bahwa mereka menaruh harapan yang besar pada kegiatan ini. Regsosek bukan hanya ditujukan kepada orang-orang tertentu, tetapi semua orang didata, mulai dari orang yang paling miskin sampai dengan orang yang paling kaya; dari pejabat, mulai dari presiden, sampai kepada rakyat biasa. Sebenarnya tidak ada paksaan kalau tidak mau didata, tetapi sebaiknya mau dan mendukung kegiatan Regsosek. Setidaknya membantu pemerintah dalam rangka perencanaan pembangunan. Bahkan, mereka akan menyesal sendiri jika tidak diikutsertakan saat ada bantuan dan pemberdayaan. Jadi, dengan keikutsertaan dalam pendataan secara lengkap, secara tidak langsung membantu pemerintah dan negara membangun masyarakat melalui perlindungan sosial dan pemberdayaan masyarakat. Selain itu, untuk memperbaiki data yang selama ini dikeluhkan oleh masyarakat karena banyak yang salah sasaran bagi penerima bantuan (hasil wawancara dengan beberapa PPL, PML, dan Koseka).



Foto: Humas BPS Kabupaten Gorontalo (2022)

**Gambar 5.10** Kepala BPS Kab. Gorontalo dan Camat Melepas Petugas



Foto: Sahajuddin (2022)

**Gambar 5.11** Tim Regsosek Bersama Responden

Inisiatif dan trik-trik para petugas memang sangat diperlukan untuk memperoleh data yang valid. BPS juga selama ini telah bermitra dengan banyak petugas lapangan yang tersebar di berbagai kecamatan, kelurahan, dan desa-desa. Salah satu pendekatan BPS yang bersifat vertikal dan menyeluruh adalah pendekatan kekeluargaan dalam proses pendataan. Pendekatan ini menjadi salah satu bagian penting

yang dibekalkan kepada petugas lapangan pada saat pelatihan dan pembekalan (Kepala BPS Kabupaten Gorontalo, komunikasi pribadi, tanggal 2 November 2022).

Salah satu wujud pendekatan kekeluargaan BPS adalah rekrutmen petugas lapangan. Peraturan rekrutmen (mitra) petugas lapangan BPS di samping melalui mekanisme perekrutan terbuka, juga diperbolehkan rekrutmen atas rekomendasi dari pak lurah dan kepala desa. Koordinator Regsosek Kabupaten Gorontalo menyampaikan bahwa rekrutmen atas rekomendasi dari kepala desa dianggap penting karena yang direkomendasikan adalah orang-orang yang mengetahui banyak tentang sosial ekonomi masyarakat desa. Masyarakat yang mau didata tidak perlu disurvei lagi oleh petugas yang direkomendasikan kepala desa. Harapannya dengan petugas lapangan yang berasal dari daerahnya sendiri akan mempermudah kegiatan Regsosek karena adanya kedekatan emosional antara masyarakat dan pendata. Jika petugas pendatannya orang luar desa atau luar dusun, biasanya masyarakat ragu-ragu memberi informasi secara terbuka dan jujur. Jika tidak becus menjalankan tugas, pihak BPS tidak perlu repot menegur petugas yang bersangkutan secara langsung, tetapi cukup menelepon kepala desa dan melaporkan kinerja petugas lapangan yang kepala desa rekomendasikan.

Pentingnya melibatkan kepala desa dengan lurah karena dulu sering ada komplain dan menyalahkan BPS, antara lain tidak mengenal petugas BPS dan tidak pernah koordinasi. Dari pengalaman itulah, BPS melibatkan kepala desa dan lurah melalui pendekatan dan inisiatif masing-masing BPS. Bukan hanya sekadar melibatkan secara lisan, tetapi melalui surat yang ditandatangani oleh kepala desa dan lurah. Tanda tangan itu sekaligus menjawab dua persoalan, terkait dengan tidak mengenal petugas dan BPS tidak melakukan koordinasi. Menurut Kepala BPS, koordinasi selalu dilakukan, bisa saja kepala desanya mengatakan seperti itu karena kepala desa baru diangkat. Keterlibatan mereka sangat diperlukan bukan hanya sekadar kepentingan BPS, tetapi juga kepentingan desa dan kepala desanya sendiri. Lurah Kayubulan menceritakan bahwa proses sosialisasi



telah dilakukan dengan menyertakan berbagai pihak (Gambar 5.12). Secara adat dan kultur lokal, melibatkan seseorang dalam kegiatan sosial secara tidak langsung membuat mereka merasa dihargai dan dihormati. Melibatkan kepala desa banyak manfaatnya, selain merasa dihargai dan dihormati, juga senang bisa terlibat karena apa yang dilakukan oleh BPS adalah tugas negara sehingga mereka sebagai abdi negara juga harus ikut bertanggung jawab.

Prioritas pertama adalah mitra yang ada di *database* BPS. Selanjutnya, kader-kader desa melalui rekomendasi masing masing kepala desa dan lurah. Dalam peta kebutuhan petugas, BPS sudah punya data awal bahwa di desa A, misalnya membutuhkan sekian PPL. Jumlah itulah yang disampaikan kepada kepala desa beserta tugas dan tanggung jawabnya. Proses rekrutmen ini memiliki aturan dan SOP dari pusat, tetapi BPS kabupaten/kota diberi hak, wewenang, dan inisiatif sendiri dalam proses rekrutmen tanpa harus menyalahi aturan yang ada.

Kabupaten Gorontalo membutuhkan 717 petugas, dengan perincian PPL 549 orang, PML 142 orang, dan Koseka 26 orang untuk menanganai sekitar 400.000 kepala keluarga. Terdapat 19 kecamatan,



Foto: Sahajuddin (2022)

**Gambar 5.12** Diskusi dengan Lurah Kayubulan Kec. Limboto

tetapi pada kecamatan yang penduduknya sangat banyak akan disesuaikan dengan kebutuhan koordinatornya. Ada yang butuh satu koordinator, ada yang butuh dua, dan ada yang butuh tiga koordinator kecamatan atau Koseka. Sementara itu, pegawai organik BPS Kabupaten Gorontalo, termasuk Kepala BPS, hanya 25 orang dan yang bisa bertugas sebagai Koseka hanya 18 orang, berarti BPS butuh 8 orang Koseka lagi untuk memenuhi 26 orang tersebut. Oleh karena itu, Kepala BPS Kabupaten harus menyurat ke BPS provinsi meminta bantuan. Jika BPS provinsi hanya bisa memenuhi 5 orang, secara aturan bisa mengambil Koseka dari mitra yang dianggap senior dan tepercaya. Itulah sebabnya ada Koseka yang nonorganik BPS.

Setelah pendaftar calon petugas lapangan dinyatakan lulus untuk menjadi mitra BPS dalam kegiatan Regsosek, mereka di-*briefing* dan diberikan pemahaman tentang tugas dan tanggung jawab, termasuk hak-haknya. Namun, pemahaman baru sebatas penjelasan bersifat kisi-kisi atau bayangan tugas mereka masing-masing jika sudah menjadi mitra BPS (PPL, PML, dan Koseka mitra), termasuk dijelaskan mengenai honor, hak, dan kewajiban mereka. Jika setuju dengan substansi *briefing*-nya, mereka langsung tanda tangan kontrak. Kemudian, setelah tanda tangan kontrak, barulah dilakukan pelatihan selama 3 hari 2 malam. Di sini cukup menarik, para calon petugas lapangan disodorkan penandatanganan kontrak terlebih dahulu sebelum dilakukan pelatihan. Tujuannya adalah untuk mengikat mereka dalam satu tanggung jawab besar.

Hal itu dilakukan oleh BPS karena tugas dan tanggung jawab para petugas lapangan sangat menentukan atas keberhasilan kegiatan pencacahan. Tugas dan tanggung jawab besar itu, baru mereka ketahui secara gamblang pada saat pelatihan selama 3 hari tersebut. Jika dilakukan pelatihan terlebih dahulu baru tanda tangan kontrak, ditakutkan ada yang mengundurkan diri. Lagi pula, anggaran pelatihannya mengeluarkan dana yang besar sehingga sistem bisnis BPS tidak tercapai jika banyak yang mengundurkan diri. Syukurnya, selama ini belum pernah ada kasus calon mitra yang mengundurkan diri karena soal tugas dan tanggung jawabnya (Kepala BPS Kabupaten Gorontalo, komunikasi pribadi, tanggal 2 November 2022). Pernyataan

di atas dilontarkan setelah di-*cross check* kepada para petugas mitra BPS, baik yang baru bermitra maupun yang sudah puluhan tahun bermitra dengan BPS. Tidak ada yang keberatan akan tugas dan tanggung jawabnya, apa lagi mau mengundurkan diri, itu tidak ada. Kalau *capek* dan lelah, itu sudah pasti, tetapi berbanding lurus dengan honor yang mereka peroleh sehingga mereka senang bermitra dengan BPS (Pendata Regsosek BPS, komunikasi pribadi, 6 November 2022).

Usaha dan upaya yang dilakukan oleh BPS untuk menyukseskan kegiatan Regsosek sudah maksimal terlihat dari upaya melintasi berbagai medan dalam perjalanan menuju lokasi rumah penduduk (Gambar 5.13). Berdasarkan pengamatan di lokasi, pada umumnya masyarakat tidak terlalu banyak yang tahu apa itu Regsosek, tetapi yang mereka hanya ingin mengetahui tujuan dilaksanakan pendataan, bukan pemahaman Regsoseknya. Petugas pun menjelaskan arti dan manfaat dari Regsosek dan keterkaitannya dengan kehidupan masyarakat yang terkait dengan kebijakan pembangunan (Gambar 5.14). Selain informasi pemahaman masyarakat terkait Regsosek, petugas pendata juga mengumpulkan data mengenai kondisi rumah warga (Gambar 5.15). Petugas pendata melaksanakan amanah untuk memotret kondisi sosial dan ekonomi warga hingga ke lokasi banjir (Gambar 5.16).

#### **D. Sisi Lain Penelitian Regsosek di Provinsi Gorontalo Dilema Kemiskinan: Keunikan dan Keindahan Desa Torosiaje (Suku Bajo)**

Berdasarkan data awal yang dimiliki peneliti, disebutkan bahwa Desa Torosiaje adalah desa unik dan indah atau desa wisata, tetapi hampir 80% penduduknya miskin. Pernyataan inilah sebagai alasan peneliti untuk menjadikan desa ini sebagai fokus desa yang ingin dielaborasi dalam pendataan Regsosek. Hal ini dianggap penting karena salah satu tujuan Regsosek adalah perlindungan sosial dan pemberdayaan masyarakat. Jika sasaran perlindungan sosial dan pemberdayaan masyarakat ditujukan kepada desa-desa yang dianggap miskin dan memiliki sumber daya alam dan potensi pengembangan ekonomi



Foto: Sahajuddin (2022)

**Gambar 5.13** Petugas menuju lokasi keluarga pendataan awal Regsosek 2022.



Foto: Sahajuddin (2022)

**Gambar 5.14** Petugas mewawancarai responden.



Foto: Sahajuddin (2022)

**Gambar 5.15** Bagian Atap Rumah yang Difoto



Foto: Sahajuddin (2022)

**Gambar 5.16** Pendataan pada Tempat Pengungsian akibat Banjir

kreatif, Desa Torosiajelah yang dianggap tepat. Akhirnya kami pun sampai di Desa Torosiaje didampingi oleh Kepala BPS Kabupaten Pohuwato dan Koordinator Regsosek BPS Provinsi Gorontalo. Sampai di sana, kami disambut dengan Koseka, PML, PPL, dan mantan Kepala Desa Torosiaje. Di situlah ada perbincangan dengan mereka, termasuk anggota masyarakat Desa Torosiaje. Syukurlah kesan pertama cukup menyenangkan, terlebih masyarakat di sana ramah dan terbuka untuk diwawancarai, tidak eksklusif sebagaimana pemahaman tentang suku Bajo zaman lampau.

Tim pada awalnya hendak mengambil lokus desa di Kabupaten Gorontalo dan memilih etnis suku Polahi dengan berbagai keunikannya. Suku Polahi berada di perbatasan antara Kabupaten Gorontalo dan Kabupaten Boalemo. Perjalanan menuju suku Polahi sangat susah dan jauh jaraknya dengan tantangan alam yang luar biasa. Dari Kabupaten Gorontalo, untuk menuju ke sana, memerlukan waktu sekitar 4–5 jam naik kendaraan roda empat. Saat sampai di lokasi tujuan masih memerlukan waktu sekitar 2 jam jalan kaki karena akses jalan tidak memungkinkan untuk naik motor apa lagi mobil. Dalam rangka kegiatan Regsosek ini, beberapa anggota suku Polahi belum terdata, tetapi beberapa bulan yang lalu ada beberapa KK yang berhasil didata berdasarkan formulir K. Sekarang tetap diusahakan terdata melalui kepala dusun mereka yang berada pada bagian terluar wilayah suku Polahi. Pendekatan dengan suku Polahi sangat susah karena mereka tidak memiliki rumah, tetapi selalu berpindah dari satu tempat ke tempat lain dalam hutan, bahkan kadang pindah hutan. Sementara itu, suku Anak Dalam (SAD) di Sumatra, tepatnya di Jambi, permukimannya masih mempergunakan tenda-tenda khusus sebagai tanda bahwa mereka tinggal di tempat itu. Oleh karena itu, ada jejak yang ditinggalkan saat mereka berpindah dari tempat itu. Namun, suku Polahi tidak ada jejaknya sehingga sangat susah dideteksi pergerakannya.

Suku Polahi sangat susah untuk ditemukan. Berdasarkan pengalaman orang, kalau kita ke sana belum tentu ketemu karena pergerakan nomadennya sangat cepat. Kalaupun berhasil dideteksi

jejaknya dan berhasil ditemukan, ada dua kemungkinan yang akan dihadapi, pertama adalah orang suku Polahi akan lari sekencang-kencangnya untuk menghindari orang yang datang atau kedua adalah suku Polahi menyerang kita tanpa ampun. Oleh sebab itu, kita tidak bisa langsung menemui mereka, harus ada perantara yang sudah dikenal baik sebelumnya. Dengan tantangan seperti itu, akhirnya kami tidak memilih suku Polahi, tetapi memilih Desa Torosiaje (suku Bajo), walaupun lokasinya bukan terletak di Kabupaten Gorontalo, melainkan di Pohuwato.

Desa Torosiaje, dilihat dari letak geografisnya, merupakan permukiman di sekitar laut yang unik dan indah. Jalan masuk menuju desa ditandai dengan adanya gapura yang menjadi petunjuk bagi orang-orang yang hendak berkunjung (Gambar 5.17). Jalan pada awalnya terlihat tanpa rumah-rumah penduduk, tetapi saat tiba ke lokasi dalam akan terlihat rumah khas warga desa yang unik. Unik karena semua rumah yang ada di desa ini terletak di atas perairan laut sebagai suku Bajo. Selain memiliki sejarah dan cerita yang unik, masyarakat suku Bajo juga tetap menjunjung tinggi adat istiadat sebagai warisan leluhur mereka. Seperti tradisi upacara pernikahan, kelahiran anak, ritual pengobatan tradisional, pantangan, dan mantra-mantra masih melekat dalam kehidupan masyarakat suku Bajo. Tradisi budaya dan kearifan lokalnya memiliki keunikan tersendiri. Walaupun mengalami perubahan yang cukup signifikan dari keunikannya yang eksklusif, kini tidak lagi se-eksklusif sejak awal keberadaannya di awal abad ke-20, tepatnya tahun 1901.

Asal-usul nama tempat atau toponimi Desa Torosiaje menurut *menti fact* yang berkembang dalam masyarakatnya atau cerita yang turun-temurun di sana disebutkan bahwa desa ini didirikan sekitar tahun 1901 oleh Pata Sompā. Kemudian, setelah kemerdekaan dan Pata Sompā sudah naik haji, sebutan nama Pata Sompā tidak lagi populer, tetapi yang populer panggilan haji-nya. Pata Sompā sebagai suku Bajo yang tinggal di perairan Torosiaje mendirikan permukiman walaupun hanya terdiri dari beberapa kepala keluarga. Lama kelamaan daerah itu makin ramai, orang-orang lalu-lalang dan menyeberang melalui



Foto: Sahajuddin (2022)

**Gambar 5.17** Gapura Menuju Desa Torosiaje, Kab. Pohuwato

pelabuhan tersebut. Orang yang selalu lalu-lalang atau menyeberang ke sana (Torosiaje) ketika ditanya mau ke mana, mereka bingung karena tidak tahu apa nama tempat itu. Mereka hanya mengingat seseorang yang terkenal di sana, yaitu haji dengan menyebut “Siaje”. Sementara itu, nama tempat atau wilayah yang ditempati Pak Haji juga belum ada namanya. Namun, tempat itu berbentuk tanjung maka disebutlah tempatnya Pak Haji dengan “Toro” (nama lokal untuk menyebut tanjung). Dalam perkembangannya, kalau orang yang lalu-lalang ke sana (ke tempatnya Pak Haji) ditanya, mau kemana? Mereka menjawab “mau ke Tanjung (toro) Haji (siaje)”, akhirnya populerlah nama Torosiaje (Tanjung Haji). Untuk menuju Torosiaje yang dikenal dengan perumahan terapung,, warga perlu melewati jalan penyebrangan dan menaiki perahu (Gambar 5.18). Setelah tiba di perumahan terapung, akan terlihat lorong jalan dengan atap yang terbuat dari kayu (Gambar 5.19).





Foto: Sahajuddin (2022)

**Gambar 5.18** Jalan Menuju Penyeberangan ke Perumahan Terapung



Foto: Sahajuddin (2022)

**Gambar 5.19** Salah Satu Lorong di Perkampungan Torosiaje

Penjelasan tersebut menunjukkan sisi keunikan Desa Torosiaje, walaupun masih bersifat umum. Sementara itu, sisi keindahan lingkungan lautnya seperti apa? Kebiasaan orang selama ini kalau ke laut atau ke pantai menyebut keindahan ketika sudah berada di lokasi. Di sana, suasananya berada dalam lingkungan rumah terapung dan strategis karena berada di Teluk Tomini ujung barat Provinsi Gorontalo. Panorama laut yang indah disajikan dengan *sunrise* dan *sunset*-nya, beserta hilir mudiknya perahu nelayan suku Bajo. Tentu indah dan menarik bagi para wisatawan dan incaran para penikmat fotografi. Itulah sebabnya Desa Torosiaje ditetapkan sebagai desa wisata oleh Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kabupaten Pohuwato sejak 2007.

Dulu orang Bajo Torosiaje hidup di atas perahu dan melakukan segala aktivitasnya di atas perahu. Untuk menghindari teriknya matahari dan derasnya air hujan, orang suku Bajo Torosiaje mengatapi perahunya dengan daun kelapa dan rumbia. Penutup itu bersifat darurat karena terkadang dilepas dan kemudian dipasang kembali pada saat dibutuhkan. Hal itu (bongkar pasang) dilakukan karena kalau tetap dipasang, sementara berada di tengah laut dan tiba-tiba ada ombak besar dan angin kencang, perahunya bisa terbalik sehingga atapnya sering dibongkar pasang. Kebiasaan lain suku Bajo Torosiaje adalah menepi di pinggir pantai untuk melengkapi kebutuhan hidupnya, termasuk mencari sungai sumber air tawar untuk dikonsumsi. Menurut keterangan dari Pak Jek (mantan Kepala Desa Torosiaje), sampai saat ini masih ada sekitar 20 KK dari masyarakat Desa Torosiaje yang pergi ke sungai mengambil air.

Suku Bajo, sebelum mengenal uang, memiliki kebiasaan menepi dan naik ke darat untuk menukarkan atau melakukan barter antara ikan tangkapannya dan barang-barang kebutuhan pokok. Namun, lama-kelamaan orang suku Bajo yang ada di atas perairan Torosiaje makin kerasan dan merasa cocok berada di sekitar Torosiaje, akhirnya mereka tinggal dan menetap di sana.

Awalnya, mereka hanya tinggal di atas perahunya yang sudah diatapi. Lama-kelamaan perahu yang sudah diatapi ini tidak dipakai

lagi melaut, tetapi khusus untuk ditinggali. Oleh sebab itu, mereka terpaksa membuat perahu baru yang dipakai untuk mencari ikan dan beraktivitas. Sementara itu, perahu yang mereka tinggali diikat dengan sebatang kayu besar yang ditancapkan ke dasar laut agar perahu tidak terombang-ambing oleh tiupan angin. Perahu-perahu tempat tinggal seperti itulah yang kemudian hari dikenal oleh masyarakat luar sebagai rumah terapung karena memang terapung. Dalam perkembangannya, suku Bajo Torosiaje ini bukannya membuat perahu, tetapi malah membuat rumah ala Bajo di perairan Torosiaje, kira-kira 1 kilometer dari bibir pantai. Namun, dalam perkembangannya, jarak antara darat dan titik rumah terdekat Desa Torosiaje dan pantai menurut data yang ada tinggal 600 meter karena ada pengembangan permukiman.

Rumah yang mereka buat bukan lagi rumah terapung, melainkan rumah yang menyerupai rumah-rumah panggung etnis Gorontalo yang terbuat dari kayu. Akan tetapi, letaknya tetap di atas laut, bukan di pinggir pantai. Kekokohan rumah itu tergantung dari kekuatan tiang-tiang rumahnya yang ditanam di dalam dasar laut kira-kira sedalam 50 hingga 100 cm. Tergantung pula besar dan jenis kayunya serta banyaknya tiang-tiang yang mereka tanam untuk satu rumah. Rumah dengan ukuran  $4 \times 5$  meter misalnya, minimal dibutuhkan 12 batang tiang. Rumah-rumah seperti itulah yang terwariskan sampai saat ini walaupun dari waktu ke waktu rumah suku Bajo Torosiaje selalu mengalami perubahan dari semua sisi dan bentuknya. Jadi, saat rumah asli suku Bajo Torosiaje sudah sangat susah ditemukan, bahkan atap yang dulunya terbuat dari daun sebagai salah satu ciri khasnya kini sudah tidak ditemukan lagi, sudah tergantikan dengan atap dari seng spandek.



Foto: Sahajuddin (2022)

**Gambar 5.20** Nelayan dan Perumahan di Desa Torosiaje

Awal permukiman suku Bajo terdiri hanya dari beberapa keluarga, tetapi lama-kelamaan mereka beranak pinak dengan membentuk keluarga baru melalui pernikahan saudara sepupu. Alasan-alasan mereka sampai tinggal menetap di situ, selain alasan yang telah dijelaskan sebelumnya, juga karena keamanan di lingkungan laut dari segala gangguan dan ancaman. Kini masyarakat suku Bajo sudah mendiami tiga desa, dua desa di darat dan satu desa di laut, yaitu Desa Torosiaje. Desa Torosiaje sebagai desa laut menyuguhkan pemandangan warna biru laut (Gambar 5.20), kini penduduknya sudah mencapai hampir 2.000 jiwa dengan 400 hingga 500 KK (PPL Regsosek, komunikasi pribadi, tanggal 5 November 2022).

Pada awal tahun 1980-an, khususnya tahun 1982, pemerintah melakukan program relokasi penduduk suku Bajo Torosiaje untuk pindah dari laut atau tinggal di darat. Di darat mereka dibuatkan rumah sederhana dan diberi tanah untuk Bertani, tetapi program itu tidak berjalan dengan baik. Awalnya ada beberapa keluarga yang berhasil direlokasi oleh pemerintah dan sebagian besar tidak mau sama sekali direlokasi dengan berbagai macam alasan. Adapun yang berhasil direlokasi, pada perkembangan berikutnya, sebagian besar di antaranya tetap kembali melaut di Desa Torosiaje dengan alasan tidak

pintar bertani, walaupun sudah dicoba tetapi tidak berhasil. Mereka hanya pintar dan terampil melaut dan mencari ikan di laut, baginya “laut adalah hidup dan kehidupannya”. Namun, seiring perkembangan zaman, mereka yang pernah direlokasi lama-kelamaan hidup dan tinggal di dua tempat antara darat dan laut. Itulah sebabnya suku Bajo Torosiaje darat juga berkembang pesat menjadi permukiman hingga menjadi dua desa karena di samping keluarga suku Bajo Torosiaje, mereka juga berdampingan dengan masyarakat suku-suku lainnya di darat. Permukiman warga Torosiaje yang hidup di laut digambarkan pada Gambar 5.21.



Foto: Risyanto (2022)

**Gambar 5.21** Kondisi Permukiman Masyarakat Torosiaje

Untuk mendukung pembangunan Desa Torosiaje, pemerintah fokus pada isu pendidikan. Masalah pendidikan sudah mulai membaik sejak tahun 2000-an karena di desa ini sudah ada SD. Beberapa tahun kemudian didirikan SMP, termasuk sekolah menengah kejuruan (SMK) yang didirikan di darat dekat pintu gerbang masuk dermaga penyeberangan ke Desa Torosiaje. Putra dan putri masyarakat Desa Torosiaje sudah banyak yang sarjana, bahkan ada yang sudah menjadi ASN, dosen pada salah satu perguruan tinggi di Kota Gorontalo, termasuk aparat Desa Torosiaje yang rata-rata sudah sarjana, walaupun juga tidak dapat dipungkiri bahwa anak-anak Desa Torosiaje sangat banyak yang putus sekolah, bahkan buta huruf. Padahal biaya sekolah

digratiskan sampai tingkat SMK, tetapi masih banyak yang putus sekolah atau tidak tertarik sekolah.

Salah satu peluang besar dan potensi perekonomian bagi Desa Torosiaje yang terkait langsung dengan profesinya sebagai nelayan atau pencari ikan di laut adalah pemanfaatan lingkungan lautnya. Menurut Pak Jek, sekitar 85% penduduk berprofesi sebagai nelayan, 5% berprofesi sebagai petani dan ojek perahu (tukang antar jemput penumpang antara desa laut (Torosiaje) dan darat dengan mempergunakan perahu), 5% berprofesi sebagai pegawai negeri dan swasta, kemudian sisanya yang 5% lagi adalah wirausaha, dan lain-lain. Menurut pengamatan, peluang yang dimaksud adalah peluang pemberdayaan dan mengoptimalkan serta memaksimalkan potensi lingkungan lautnya. Desa Torosiaje adalah desa yang semua rumahnya berada di atas permukaan air laut antara 2 dan 6 meter kedalaman airnya. Kemudian secara kultural, mereka akrab dan menyatu dengan laut, memiliki kearifan dan keterampilan menangkap dan memelihara ikan laut maka pemberdayaan yang paling cocok adalah budi daya ikan laut.

Semua rumah penduduk Desa Torosiaje memiliki kolam dan pekarangan perairan yang mestinya dimanfaatkan secara maksimal untuk budi daya ikan laut. Walaupun sudah ada sebagian kecil yang telah memiliki keramba, jika hal ini dapat dimaksimalkan dan dapat dijadikan program pemerintah melalui pemberdayaan masyarakat, tidak menutup kemungkinan menjadi peluang pertumbuhan ekonomi baru bagi masyarakat Desa Torosiaje. Hanya yang menjadi tantangan terbesar adalah masalah kebersihan lingkungan dan halaman rumah masyarakat yang ingin dijadikan lokasi pembuatan dan tempat budi daya ikan laut berupa keramba. Kebersihan dari sampah-sampah laut, baik berupa daun, kayu, plastik, dan sampah-sampah lainnya masih tergolong baik karena adanya tradisi kerja bakti dan gotong royong.

## **E. Kelembagaan Adat: Pemantik dan Partisipasinya**

Tata kelola Desa Torosiaje selain lembaga pemerintahan desa, juga ada lembaga adat. Dua lembaga itu menjadi motor penggerak Desa Torosiaje, bahkan menjadi simpul dan tempat penyelesaian berbagai macam persoalan. Jadi, lembaga tersebut harus dipimpin oleh orang-orang pilihan secara kultural dan dipilih secara kolektif oleh masyarakat. Orang yang dapat menjadi kepala desa adalah warga Desa Torosiaje yang memiliki rekam jejak yang baik. Setelah itu, ikut aturan pemerintah melalui pemilihan langsung calon kepala desa. Siapa-pun yang menang dalam pemilihan harus dihargai, dihormati, dan didukung. Bukan hanya dukungan dalam wujud verbal atau kata-kata, melainkan harus diwujudkan dalam bentuk perbuatan.

Desa Torosiaje merupakan salah desa yang memiliki fungsi-fungsi kelembagaan adat yang bersifat sosial. Lembaga adat di Desa Torosiaje lebih khusus menangani masalah tradisi dan adat istiadat yang ada di Desa Torosiaje suku Bajo. Adat istiadat yang dimaksud cukup banyak sebagaimana diuraikan sebelumnya. Sebagai contoh adalah adat perkawinan. Sebenarnya adat perkawinan suku Bajo Torosiaje hampir sama dengan adat perkawinan suku-suku lainnya, tetapi banyak perbedaan dalam proses pelaksanaannya. Misalnya, etnis Gorontalo mengenal pesta jamuan dua pihak (pihak laki-laki dan pihak perempuan), sedangkan suku Bajo Torosiaje hanya mengenal satu jamuan, yaitu pihak perempuan yang melakukan jamuan pesta.

Pada saat lamaran, ada acara lempar jawab pantun antara pihak laki-laki dan perempuan. Jika pihak laki-laki yang melamar kalah dalam lempar jawab pantun, kemungkinan besar lamarannya ditolak. Walaupun sesungguhnya telah ada musyawarah pendahuluan sebelum lamaran resmi atau sudah melakukan kesepakatan. Misalnya, pada waktu musyawarah awal, pihak keluarga laki-laki sudah disetujui dan diterima oleh pihak keluarga perempuan. Jumlah uang pesta yang disediakan oleh pihak laki-laki juga sudah disepakati nominalnya, tetapi jika kalah dalam lempar jawab pantun, semua kesepakatan

itu bisa saja gugur. Makanya di Desa Torosiaje suku Bajo kalau mau pergi melamar, harus cakap mencari pelamar yang memiliki kehebatan berpantun. Sebisa-bisanya carilah orang hebat itu tidak jauh dari pihak perempuan supaya gampang diterima lamarannya. Sementara itu, nominal uang pestanya tidak memberatkan dan yang umum sering ditemukan di suku Bajo Desa Torosiaje hanya berkisar dari Rp10 juta hingga Rp20 juta, sangat jauh berbeda dengan uang pesta (uang panai) suku Bugis Makassar yang bisa mencapai miliaran rupiah.

Syarat menjadi kepala adat di Desa Torosiaje adalah mereka yang dituakan, tidak mesti tua secara umur, tetapi tua dalam arti pengalaman dan pengetahuan. Syarat penting lainnya adalah pewarisan adat suku Bajo Torosiaje yang ada pada diri calon. Syarat yang dimaksud adalah syarat tentang pengetahuan adat dan pemahaman sejarah adat Bajo Torosiaje. Alasan pentingnya atau wajib mengetahui dan memahami adat dan sejarah adat suku Bajo adalah karena hal ini berbanding lurus dengan tanggung jawab yang diembannya. Tanggung jawab yang dimasud adalah tanggung jawab dalam memutuskan perkara-perkara adat. Terkadang ada masalah-masalah yang cukup rumit diselesaikan oleh kepala desa, tetapi karena ada kaitannya dengan persoalan adat, persoalan-persoalan seperti itu akan diserahkan dan menjadi tanggung jawab kepala adat. Lalu bagaimana caranya kepala adat mampu memutuskan perkara tersebut jika kepala adat tidak mengerti dan paham adat itu sendiri.

Kelembagaan adat suku Bajo Torosiaje juga menangani masalah kepemilikan rumah dan pembangunan rumah di Desa Torosiaje. Menurut Pak Jek, siapa saja warga Desa Torosiaje yang mau membangun rumah baru diperbolehkan asal seizin dengan lembaga adat. Juga harus mengikuti tata ruang desa yang diatur oleh lembaga adat dan pemerintah desa. Hal ini terkait dengan pembangunan rumah baru di lokasi yang baru. Namun, ada juga pembangunan rumah yang sebelumnya sudah ada, tiba-tiba rumah itu rusak dan tidak dibangun lagi oleh pemiliknya.



Lokasi kosong itu tetap dianggap ada pemiliknya secara adat sehingga jika ada warga yang mau membangun rumah di lokasi itu harus seizin pemilik lamanya dan harus mendapat persetujuan dari lembaga adat. Jika pemilik lamanya tidak mengizinkan dengan alasan akan membangun kembali, pihak yang ingin membangun baru tidak diperbolehkan secara adat. Walaupun secara legalitas tidak ada bukti kepemilikan, tetapi secara adat Desa Torosiaje kepemilikan tersebut diakui. Lalu bagaimana dengan persoalan jual beli rumah atau lokasi permukiman di Desa Torosiaje? Selama ia adalah warga Desa Torosiaje maka secara adat diperbolehkan untuk melakukan jual beli rumah dan jual beli lokasi bekas rumah, meskipun harus melalui lembaga adat. Akan tetapi, rumah yang ada di Desa Torosiaje tidak dapat dijadikan agunan di bank karena rumah itu tidak memiliki sertifikat kepemilikan.

Lembaga sosial Desa Torosiaje juga menangani masalah kebersihan lingkungan. Pada Desa Torosiaje ada program pemerintah desa yang dikenal dengan Jumat bersih yang lama-kelamaan dijadikan tradisi dengan melibatkan masyarakat desa. Awalnya diumumkan di masjid, tetapi dalam perkembangannya, sudah menjadi kebiasaan dan ditradisikan. Saat ini, masyarakat sangat patuh jika ada gotong royong, jika orang tuanya berhalangan, pasti ada perwakilannya. Minimal menyediakan makanan dan minuman ringan jika mereka tidak bisa hadir karena alasan penting. Agar anggota masyarakat terlibat dalam kegiatan adat dan tradisi, biasanya dibantu oleh Karang Taruna. Apalagi lembaga adat dan pemerintah Desa Torosiaje sangat dihormati dan dipatuhi seruan dan perintahnya.

Bahkan, dulu kalau tidak bisa datang, akan mendapat hukuman cambuk dari lembaga adat, tetapi sekarang sudah tidak ada lagi hukuman seperti itu. Hukuman yang ada sekarang adalah akan dikucilkan oleh anggota masyarakat desa. Misalnya, jika ia melakukan pesta pernikahan anaknya, lembaga adat dan pemerintah desa akan mempersulit pengurusan administrasi, tidak diberi izin menggunakan gedung desa di saat jamuan pernikahan, dan anggota masyarakat tidak berani hadir jika lembaga adat dan pemerintah desa tidak merestuinnya.

Masyarakat Desa Torosiaje termasuk masyarakat yang patuh dan ikut dengan aturan pemerintah. Hal itu terlihat sejak tahun 1980-an saat mereka akan direlokasi secara bertahap. Akan tetapi, tahap pertama tidak berjalan baik dengan alasan sebagaimana diuraikan sebelumnya maka wajar jika tahap-tahap berikutnya tidak berjalan sesuai dengan harapan dan aturan. Kepatuhan itu juga terlihat pada saat COVID-19 yang ditunjukkan dengan partisipasi mereka ikut program vaksin, memakai masker, rajin mencuci tangan, dan menjaga jarak.

Asal kepatutan itu tidak melukai adat istiadat orang suku Bajo Torosiaje, artinya bahwa seruan dan aturan pemerintah harus disesuaikan dengan adat dan kearifan lokal masyarakat Desa Torosiaje. Atas kepatutan itulah, pemerintah membangun infrastruktur dan sarana prasarana Desa Torosiaje, termasuk fasilitas aliran listrik PLN, aliran air bersih, dan bantuan gas elpiji 3 kg. Bukan hanya itu, program bantuan lainnya juga masuk di Desa Torosiaje, misalnya Bantuan Langsung Tunai (BLT) dan bantuan sembako, termasuk bantuan pemberdayaan. Walaupun demikian, Desa Torosiaje masih tergolong desa miskin dengan sekitar 80% penduduknya berpendapatan rendah menurut PPL Regsosek BPS 2022. Uraian tersebut mencerminkan bahwa masyarakat Desa Torosiaje adalah desa yang memiliki kepatuhan yang cukup tinggi kepada kelembagaan adat desa dan kepatuhan kepada pemerintah desa hingga pemerintah pusat. Hal itu juga terlihat pada partisipasi dan dukungan yang cukup tinggi terhadap proses pendataan Regsosek.

## **F. Pengalaman para Pendata Regsosek: Perspektif Koseka, PML, dan PPL**

Ujung tombak Regsosek BPS 2022 adalah para petugas lapangan, tanpa mengesampingkan staf BPS, mulai dari kepala, koordinator, supervisor, penginput data, Koseka, dan petugas lainnya. Kerja sama semua pihak itulah yang akan menentukan berhasil tidaknya proses Regsosek. Namun, petugas yang dibahas secara singkat dalam

subbagian ini adalah petugas mitra BPS dalam kegiatan Regsosek, khususnya PPL, PML, dan Koseka. Berdasarkan temuan lapangan di Provinsi Gorontalo, Koseka sebaiknya dari pegawai organik BPS, tetapi tidak menutup kemungkinan Koseka diambil dari mitra BPS. Mitra yang diutamakan ialah yang memiliki rekam jejak yang bagus dan telah lama bekerja sama dengan BPS. Mengambil dan memilih Koseka dari pihak mitra karena biasanya pegawai organik BPS cukup terbatas di wilayah tersebut. Oleh karena itu, responden yang mau dicacah jumlahnya cukup banyak, mau tidak mau merekrut Koseka dari pihak mitra. Kerja Koseka ini juga menarik untuk dibincangkan bersama PML dan PPL. Dengan demikian, tiga tingkatan mitra BPS ini dianggap penting untuk dieksplorasi, khususnya kisah dan pengalamannya terlibat dalam proses Regsosek, sebab tiga ujung tombak lapangan inilah sebagai garda terdepan. Darinyalah data Regsosek bermula dan darinya pula lah akan menjadi data tunggal untuk perlindungan sosial dan pemberdayaan masyarakat.

Banyak cerita dan pengalaman tentang tiga petugas (PPL, PML, dan Koseka) lapangan pada kegiatan Regsosek BPS 2022. PPL sebagai petugas pendata di lapangan merupakan petugas paling banyak memperoleh pengalaman dan cerita antara dirinya dan responden atau anggota masyarakat yang didata, mulai dari cerita pengalaman kerja yang cukup menantang dan melelahkan karena harus naik-turun rumah (rumah panggung) hingga masuk-keluar rumah responden sejak pagi hari hingga sore hari dengan menghadapi berbagai macam karakter responden. Kegiatan PPL dan petugas lainnya berlangsung selama satu bulan, sejak 15 Oktober–14 November 2022 atau mendata kepala keluarga dari 250 hingga 300 KK. Syukur-syukur jika rumah penduduk berdekatan, tetapi banyak desa yang rumah penduduknya cukup berjauhan. Terkadang juga harus mendatangi sampai tiga kali baru dapat bertemu pemilik rumah dengan berbagai penyebab. Jarak tempuh, medan, dan topografi wilayah juga bervariasi. Bukan hanya berhadapan dengan orang yang berbeda karakter, tantangan alam, tetapi juga harus berhadapan dengan binatang yang tidak familier bagi PPL, baik di jalan maupun dalam pekarangan rumah responden.

Binatang yang dianggap menantang dan membuat para petugas agak ketakutan adalah ular, biawak, babi, dan anjing.

Namun, di balik cerita pengalaman yang menantang, melelahkan, dan memacu adrenalin, kegiatan Regsosek juga sarat dengan cerita lucu dan menyenangkan. Tidak sedikit anggota keluarga yang kegirangan kalau BPS melakukan pencacahan. Banyak di antara mereka bersemangat untuk didata. Bahkan saking bersemangatnya, ia pergi mendatangi tetangganya yang sedang didata, sekadar ingin mendengar tujuan pendataan, apakah akan mendapatkan bantuan atau tidak. Namun, karena terlalu serius mendengar, ia tidak ingat sedang memasak nasi sampai nasinya gosong dan tercium di tempat pencacahan. Mereka tersentak, kaget, dan ketakutan karena dikira rumahnya juga ikut terbakar. Untunglah rumahnya tidak terbakar dan suaminya tidak marah ketika pulang bekerja dari kebun.

Ada juga responden yang menolak untuk dicacah, tidak jujur memberi keterangan, dan banyak lagi cerita-cerita lainnya. Berdasarkan SOP, jalan keluar dari persoalan itu biasanya PPL membujuk, merayu dengan memberi pemahaman, atau melakukan *probing*. Kalau langkah itu tidak berhasil maka biasanya PPL menghubungi kepala dusun dan menghubungi/menelepon PML untuk datang ke lokasi kejadian. Cerita dan pengalaman yang paling banyak dialami oleh PPL adalah pertanyaan dari responden “kenapa didata?”, “ada bantuan apa?” karena rata-rata responden ialah golongan menengah ke bawah yang selalu berharap mendapatkan bantuan kalau ada pendataan dari BPS. Dengan demikian, banyak di antara mereka yang tidak jujur memberi jawaban ketika ditanya oleh PPL. Akan tetapi, untunglah kebanyakan PPL, berdasarkan temuan di lapangan, dapat melakukan *probing* dan menemukan cara bijak tanpa menggurui jika menemukan gejala ketidakjujuran responden.

Cerita pengalaman seperti itulah yang membuat PPL merasa beruntung terlibat dalam proses Regsosek BPS 2022 karena mendapat banyak pelajaran yang sangat berharga selama melakukan pendataan. Mereka juga merasa beruntung karena mendapat banyak teman baru dan keluarga baru yang cukup menyenangkan. Selain itu, para PPL

selalu berharap agar pada pencacahan-pencacahan selanjutnya mereka terpilih lagi menjadi mitra BPS. Di samping pengalaman tersebut, juga karena mendapatkan honor yang cukup kompetitif dengan honor-honor pekerjaan lainnya, bahkan dianggap lebih menguntungkan. Terkait harapan para PPL dalam kegiatan Regsosek 2022, mereka berharap agar data yang mereka peroleh betul-betul menjadi *database* atau data tunggal untuk semua kementerian dan lembaga pemerintah. Hal ini perlu ditindaklanjuti, berdasarkan temuan kami di lapangan, dari dua kasus, yaitu kasus salah sasaran bantuan dan kasus ketidakjangkauan pendataan sebelumnya.

Kasus salah sasaran dalam program bantuan pemerintah bukan rahasia lagi, hampir terjadi di seluruh desa-desa atau kelurahan di Indonesia. Lucu dan mengherankan karena terjadi berulang-ulang sehingga warga melakukan protes. Oleh karena itu, dengan adanya kegiatan Regsosek BPS ini, kasus salah sasaran bantuan pemerintah tidak terulang kembali, atau setidaknya-tidaknya dapat berkurang secara signifikan.

Sementara kasus jangkauan pendataan sebelumnya menjadi sangat penting dalam kegiatan Regsosek ini, bahkan menjadi pembeda dari pencacahan yang sudah ada sebelumnya. Pencacahan selama ini tidak terlalu fokus pada persoalan kemiskinan secara ekonomi dan secara sosial-kultural, sementara pencacahan Regsosek fokus dalam bingkai itu. Temuan kami dalam mendampingi PPL di lapangan menunjukkan bahwa banyak golongan keluarga miskin yang belum terdata pada pencacahan sebelumnya, yakni di Desa Torosiaje, Kecamatan Popayato, Kabupaten Pohuwato dan di sekitar Danau Limboto, Kelurahan Kayubulan, Kecamatan Limboto, Kabupaten Gorontalo, Provinsi Gorontalo.

Sebagian dari PPL adalah orang yang sudah berpengalaman dan bermitra dengan BPS. Para PPL juga kebanyakan bertugas pada daerah di mana mereka berasal sehingga para PPL dan calon respondennya secara emosional sudah saling mengenal atau setidaknya PPL paham daerah yang menjadi tugasnya. Banyak juga PPL berasal dari aparat desa, misalnya staf pegawai desa, kepala

dusun, ibu PKK desa, dan lain-lain. Para PPL memiliki kedekatan sosial dan budaya dengan masyarakat setempat. Dari segi tingkat pendidikan para PPL juga bervariasi, mulai dari tamatan SMA dan sederajat, tetapi juga banyak di antaranya sudah sarjana. Dalam hal ini, secara teknis dan segala persoalan yang dihadapi dalam kegiatan Regsosek, PPL telah punya trik dan cara untuk menyelesaikannya. Berdasarkan hasil wawancara dengan mereka, ditemukan bahwa kesulitan terbesar PPL dalam proses pendataan adalah kemampuan dan keterampilan berkomunikasi dengan responden. Jadi, PPL harus memiliki keterampilan berkomunikasi dengan baik dan lancar, santun dan ramah, serta memiliki keterampilan berbahasa lokal dengan responden sebab banyak responden yang tidak lancar, bahkan tidak pintar berbahasa Indonesia.

Lalu bagaimana cerita dan pengalaman PML. PML sebagai petugas pengawas dan pemeriksa hasil pencacahan PPL dalam kegiatan Regsosek BPS 2022, juga memiliki cerita dan pengalaman tersendiri. Cerita pengalaman PML memang tidak sebanyak cerita pengalaman PPL karena PML tidak langsung berhadapan dengan responden, PML hanya berhadapan dengan PPL. Lagi pula, setiap PML hanya memiliki 4 orang PPL. Namun, dari segi kekayaan pengetahuan dan cerita pengalaman, mungkin PML lebih kaya karena seluruh cerita pengalaman 4 orang PPL-nya sampai juga di telinga PML. Sejatinya PML juga adalah mitra BPS yang dianggap sudah tepercaya karena yang dijadikan PML adalah mitra BPS yang sudah sering terlibat dalam kegiatan pencacahan BPS di wilayah tersebut. Bahkan terkadang, mereka adalah aparat desa, kepala dusun, atau anggota masyarakat yang banyak mengetahui seluk beluk masyarakat setempat. Setidaknya jangkauan pergaulannya cukup luas dan dikenal banyak oleh masyarakat setempat. Menurut beberapa staf organik BPS, termasuk kepala BPS, perekrutan seperti itu memiliki banyak keuntungan. Utamanya alasan kedekatan emosional emik masyarakat terhadap PML dan PPL, termasuk persoalan *probing* dengan pemahaman bahasa setempat. Misalnya, di Desa Torosiaje, tidak mungkin pendataan dapat berjalan lancar jika mempergunakan PPL

dan PML yang bukan anggota masyarakat setempat dan tidak bisa berbahasa suku Bajo. Masyarakat di sana yang mau didata hanya pintar dan lancar berbahasa ibunya, yaitu bahasa suku Bajo.

Cerita pengalaman PML terhadap PPL tidak banyak ditemukan, kecuali cerita-cerita tentang PPL yang menelepon PML ketika PPL menemui responden yang susah didata. Ada juga cerita tentang rumah yang selalu kosong dan cerita tentang adanya temuan PML terkait kurang validnya hasil pendataan PPL sehingga harus didata ulang dengan cara mendatangi langsung atau dengan cara jitu lainnya tanpa harus melanggar SOP. Salah satu cerita menarik tentang hubungan antara PML dan PPL adalah cerita kedekatannya di luar kegiatan Regsosek. Salah seorang PPL yang sempat diwawancarai bercerita bahwa dia berasal dari keluarga miskin, hanya punya rumah yang sangat sederhana dari warisan orang tuanya, punya anak tiga orang yang masih kecil, dan suaminya hanya kerja serabutan. Oleh karena itu, ibu PPL ini, selain menjadi petugas PPL Regsosek, juga bekerja di tempat *laundry*. Beruntungnya, pemilik usaha *laundry* adalah orang baik hati dan pengertian. Pernah ada kejadian berulang, yaitu pakaian pelanggan rusak dan harus diganti dengan pakaian dan kualitas yang sama, tetapi pemilik usaha *laundry* tidak memarahinya, termasuk tidak menyuruhnya mengganti pakaian yang rusak tersebut.

Pemilik usaha *laundry* malah memberinya semangat, bahkan dia yang mengganti pakaian pelanggan yang rusak. Dari pengalaman itulah, PPL alias buruh *laundry* ini merasa beruntung dan membuatnya makin serius dan fokus dalam bekerja. Namun, setelah dilakukan pendalaman tentang siapa pemilik *laundry* tersebut, ternyata beliau adalah seorang ibu yang bertugas sebagai PML dan bermitra dengan sang ibu PPL atau buruh kerja usaha *laundry* tersebut. Setelah dikonfirmasi kepada PML tersebut, “kenapa begitu baik sama ibu PPL itu?”, ia menjawab bahwa ia (ibu PML) kasihan pada keadaannya (ibu PPL). Selain itu, ia juga mengatakan bahwa menolong orang adalah amal dan tidak membuatnya takut jatuh miskin (cukup menginspirasi).

Salah satu temuan lain terkait dengan PML sempat membuat kami berpikir dan termenung. Setelah kami diskusikan kepada tim

(BRIN), juga berdiskusi dengan salah satu koordinator Regsosek, kami memutuskan untuk menyampaikannya kepada Kepala BPS Provinsi Gorontalo di sela-sela jamuan makan malam. Awalnya beliau kaget mendengar cerita itu, tetapi setelah didiskusikan secara santai kejadian itu kami anggap lumrah, terutama pada bagian tertentu dari kejadian itu karena sudah beberapa kali terjadi. Namun, dengan kejadian tersebut, seharusnya kegiatan Regsosek awal 2022 ini menjadi peluang dan momen yang paling tepat untuk menghasilkan *database* dan menjadikannya data tunggal untuk semua. Temuan yang dimaksud adalah ada salah seorang PML yang sedang berjalan kontraknya dalam kegiatan Regsosek BPS 2022. Namun, PML yang dimaksud juga terlibat menjadi petugas pendata lembaga pemerintah lainnya di kelurahan yang sama dengan tugas PML-nya pada jadwal waktu yang hampir bersamaan. Setelah didiskusikan, kami berkesimpulan bahwa PML ini tidak dianggap melanggar karena tidak ada klausul kontrak terkait larangan terlibat pencacahan pada lembaga lain. Kecuali, jika dia tidak menyelesaikan atau lalai dari tugasnya sebagai PML, barulah akan diproses oleh pihak BPS.

Meskipun demikian, kejadian tersebut dapat berimbas dan memengaruhi tujuan Regsosek untuk menjadikannya *database* atau data tunggal untuk semua kementerian dan lembaga. Pada saat yang bersamaan dengan kegiatan Regsosek BPS 2022 ini, juga ada lembaga pemerintah lain yang sedang melakukan pendataan dengan pertanyaan-pertanyaan yang mirip dengan pertanyaan kegiatan Regsosek. Inilah PR besar pemerintah pusat untuk membenahi setiap kementerian dan lembaga supaya tidak terjadi *overlapping* pencacahan. Hal ini juga menunjukkan bahwa ego sektoral di setiap kementerian dan lembaga masih terjadi dan kuat. Kenyataan ini harus dikoordinasikan oleh kementerian dan lembaga yang berkepentingan pada data-data pencacahan. Mungkin juga perlu didiskusikan dan dicari jalan keluarnya agar data-data BPS yang makro bisa dimikrokan dan dapat dengan mudah dimanfaatkan oleh kementerian dan lembaga lainnya.



Lain cerita pengalaman PPL dan PML, lain pula cerita pengalaman Koseka mitra BPS. Salah seorang Koseka nonorganik BPS yang sempat kami temui dan wawancarai memiliki segudang cerita pengalaman bersama BPS karena dia adalah mitra BPS sejak tahun 2008. Pencapaiannya menduduki jabatan Koseka nonorganik BPS tentu tidak gampang, prosesnya dimulai dari bawah. “Alhamdulillah”, katanya, dia dipercaya oleh BPS Kabupaten Gorontalo menjadi Koseka dalam kegiatan Regsosek BPS 2022 ini. Ia belum banyak bisa membagi cerita pengalaman terkait dengan kegiatan Regsosek, tetapi cerita pengalaman selama menjadi mitra BPS sudah tidak terhitung lagi. Cara bicara dan pemilihan diksi-diksi dalam menyampaikan sesuatu membuat kami yakin bahwa dia sudah berpengalaman sampai bisa menjadi mitra BPS. Di lain kesempatan, kami juga mendapat informasi bahwa istri Koseka tersebut juga menjadi bagian dari kegiatan Regsosek sebagai PML. Di situlah membuat kami lebih yakin bahwa Koseka ini cukup berpengalaman dan memiliki rekam jejak yang baik selama bermitra dengan BPS.

Cerita pertama yang dapat kami tangkap dari Koseka ini selama bermitra dengan BPS adalah terkait dengan tempat penugasan. Dia tidak pernah memilih-milih desa yang ditugaskan padanya dalam proses pencacahan. Baginya, setiap desa memiliki cerita tersendiri dan membuat dirinya makin banyak keluarga karena salah satu motivasinya menjadi petugas BPS adalah memperbanyak keluarga dan senantiasa menjalin silaturahmi. Cerita kedua adalah tentang trik-trik *probing* pada sasaran pencacahan untuk memperoleh data yang valid dari responden. Salah satu yang menarik adalah trik untuk membuktikan responden memiliki aset. Hindarilah pertanyaan-pertanyaan yang jawabannya hanya dua pilihan, ada atau tidak ada. Misalnya, apakah bapak memiliki sapi? Selain rumah ini, ada lagi rumah bapak? Apa ibu punya kulkas? Jika responden ditanya seperti itu dan dia ingin mendapatkan bantuan, kemungkinan besar akan memberi jawaban “tidak memiliki, tidak ada, dan tidak punya”. Namun, jika mengejanya dengan pertanyaan jebakan terkait dengan jumlah atau satuan, sulit untuk tidak jujur. Misalnya, “berapa ekor sapi yang dimiliki bapak?

Selain rumah ini, di mana lagi alamat rumah bapak? Apa-apa saja yang ada dalam kulkas ibu?

Sebagai Koseka yang bertugas dan bertanggung jawab atas kinerja PPL dan PML; melakukan koordinasi dan pengawasan lapangan; memeriksa hasil dan membuat laporan lapangan; serta tugas dan tanggung jawab lainnya, keberhasilannya akan ditentukan oleh keberhasilan PPL dan PML-nya. Oleh karena itu, menurut Koseka, mereka selalu melakukan koordinasi dan melakukan *briefing* terhadap PPL dan PML-nya sebelum mengerjakan tugas di lapangan.

Menurutnya, melakukan koordinasi dan *briefing* sangat penting karena kita berusaha memecahkan persoalan sebelum menemui masalah. Langkah-langkah yang diambil ini mungkin juga sering dilakukan oleh Koseka di tempat lain, tetapi terkhusus untuk timnya, *briefing* adalah kewajiban. Menurut Koseka, ia beruntung karena telah lama dijadikan mitra oleh BPS sehingga pengalaman itu menjadi pelajaran dan bekal besar yang sangat berharga. Pengalaman itulah yang ia bagikan kepada para PPL dan PML di saat mereka bertemu, berdiskusi, koordinasi, dan pada saat *briefing* dengan harapan tugas dan tanggung jawab bersama dapat diselesaikan dengan baik.

Selain cerita pengalaman sebagaimana disampaikan oleh Koseka tersebut, juga ada cerita tradisi dan adat istiadat unik yang pernah ia temui dan rasakan selama bertugas dan bermitra dengan BPS. Tradisi dan adat istiadat yang dimaksud itu adalah tradisi Jatón (Jawa Tondano). Dari namanya saja sudah menunjukkan adanya asimilasi antara Jawa dan Tondano. Pertanyaannya demikian “apakah betul terjadi asimilasi antara Jawa dengan Tondano, dan bagaimana asimilasi itu terjadi?”. Dalam beberapa sumber (Arbie & Kalangi, 2011; Arbie & Mantau, 2012; Paramita & Sari, 2016) disebutkan bahwa adanya Jawa Tondano (Jatón) di Sulawesi Utara karena ada kaitannya dengan pengasingan atau pembuangan Pangeran Diponegoro dekade ketiga abad ke-19 pada masa pemerintahan Hindia Belanda (Indonesia pada masa penjajahan Belanda).

Ketika beliau (Pangeran Diponegoro) diasingkan di Manado, Sulawesi Utara, Pangeran Diponegoro telah memiliki pasukan yang

hebat. Kyai Modjo menjadi kepercayaan Pangeran Diponegoro sehingga ketika beliau diasingkan maka Kyai Modjo harus ikut. Ketika Kyai Modjo diminta untuk ikut ke tempat pengasingan di Sulawesi Utara, Kyai Modjo memilih-milih pasukannya yang dapat diikuti ke sana. Antara pengikut Pangeran Diponegoro dan Kyai Modjo dengan masyarakat setempat saling mengadaptasikan diri masing-masing. Lama-kelamaan di antara mereka terjadi asimilasi dalam bentuk pernikahan antara pasukan Kyai Modjo dan seorang putri yang ada di Tondano tersebut.

Kemudian keturunan merekalah yang dikenal dengan Jaton (Jawa Tondano), bukan lagi Jawa dan bukan juga Tondano, melainkan campuran gen asimilasi perkawinan. Sebanyak 50 sampai 60 orang pasukan Kyai Modjo dikabarkan menikah dengan perempuan Tondano. Dalam perkembangannya, mereka tersebar di mana-mana, termasuk banyak yang pindah ke Gorontalo sebagai wilayah yang memiliki lahan pertanian luas. Mereka (Jawa dan Tondano) juga saling memengaruhi, termasuk masalah marga atau fam sehingga Jaton juga memiliki marga atau fam, salah satunya adalah fam Kyai Demak sebagaimana fam Koseka nonorganik BPS yang sempat diwawancarai.

Lalu apa keunikan Jaton di Desa Yosonegoro, Gorontalo? Menurut Koseka yang diwawancarai, di Jaton ada dua tradisi yang paling menonjol dan unik karena tidak ada di tempat lain di Gorontalo, yaitu tradisi pemakaman orang yang meninggal dan tradisi Maulid Nabi. Tradisi pemakaman orang meninggal di Jaton Desa Yosonegoro, Kecamatan Limboto Barat dianggap unik karena adanya tugas menggali kubur secara bergiliran berdasarkan posisi rumah dari Masjid Al-Muttaqin. Jika posisi rumah orang yang meninggal berada di sebelah kanan Masjid Al-Muttaqin, anggota masyarakat yang melakukan penggalian dan proses pemakaman adalah mereka yang posisi rumahnya berada di sebelah kiri Masjid Al-Muttaqin.

Menariknya, secara tradisi masyarakat di sana berbondong-bondong datang di tempat penggalian kuburan tanpa harus ada komando atau yang menyuruhnya. Sebagai tanda adanya orang

yang meninggal, biasanya diumumkan di masjid dan adanya bunyi kentongan yang menandakan posisi rumah yang meninggal. Jika anggota masyarakat berada di desa dan tidak terlibat dalam kegiatan pemakaman, hal itu dianggap memalukan dan menjadi aib seumur hidup. Tradisi ini sudah berlangsung sampai saat ini. Sementara itu, tradisi kedua adalah tradisi Maulid Nabi Muhammad saw. Jika tradisi perayaan Maulid Nabi di tempat lain hanya dilakukan satu kali pada setiap tahun, di Desa Yosonegoro dilakukan selama 7 hari 7 malam dengan berbagai macam rangkaian acara. Namun, yang paling populer adalah acara makan-makannya yang terbuka untuk semua orang yang datang bertamu di desa tersebut. Bukan hanya sekadar makan, tetapi tamu juga wajib membawa pulang makanan yang disajikan oleh tuan rumah yang didatangi.

## **G. Kisah Ibu Hare: Profil Peserta Regsosek**

Kisah ini tentang salah satu rumah tangga yang terletak di Dusun Sengkang, Desa Torosiaje, Kecamatan Popayato, Kabupaten Pohuwato, Provinsi Gorontalo. Ibu rumah tangga ini adalah *single parent* yang tinggal di tengah laut sebagai suku Bajo. Suaminya telah meninggal dunia kira-kira 15 tahun yang lalu dengan 5 orang anak, 3 perempuan dan 2 laki-laki. Ibu Hare hanya mendapat warisan dari suaminya berupa sebuah rumah yang sangat sederhana sebagai tempat pelipurlara. Sekadar bisa berteduh dari terik matahari, derasnya air hujan, dan kencangnya angin laut di malam hari. Rumahnya berdinding papan yang sudah bolong-bolong dimakan usia, diberi sekat kayu berbentuk dua buah kamar, dan sisanya sebagai ruang tengah serta balai angin di depan rumahnya untuk dijadikan tempat bermain anak-anaknya. Perabot rumahnya pun ala kadarnya, hanya berupa peralatan dapur dan tiga buah kursi plastik. Warisan harta lain yang paling berharga dari suaminya adalah sebuah perahu kecil. Perahu inilah yang dipakai oleh Ibu Hare untuk mencari nafkah sehari-hari. Sebagai ibu *single parent* dan sebagai orang suku Bajo, mau tidak mau ia harus mampu menghidupi lima orang anaknya yang masih kecil dari hasil melaut. Kondisi anak-anaknya yang masih kecil memaksanya pergi melaut

seorang diri. Ketika anak laki-lakinya berumur 5 hingga 7 tahun, ia terkadang ditemani oleh anaknya yang masih kecil itu. Hal itu penting dilakukan sebagai proses adaptasi pembelajaran lingkungan dan bentuk pewarisan ilmu melaut melalui praktik lapangan tanpa harus mendikte.

Dengan bertambahnya tahun, anaknya makin besar dan memerlukan biaya untuk hidup. Namun, apa yang mau dikata dan diperbuat oleh ibu *single parent* ini, kecuali melaut setiap hari. Hanya ada dua pilihan waktu melaut bagi sang Ibu Hare, sore atau pagi hari dengan beberapa pertimbangan, termasuk cuaca. Kalau pergi melaut sore hari atau menjelang malam, ia pulang pagi hari. Jika pergi pada pagi hari, ia bisa pulang sore hari. Demikian rutinitas pekerjaan yang dilakukan oleh ibu ini setiap hari untuk dapat menghidupi lima orang anaknya. Saat ia tidak melaut satu hari, berarti keluarganya tidak bisa makan hari itu karena tidak ada penghasilan lain, tabungan, atau pangan yang bisa dimanfaatkan, kecuali hasil melaut pada hari itu.

Kehidupan yang memprihatinkan itu juga berimbas kepada pendidikan anak-anaknya. Dari lima orang anaknya, tidak satu pun yang mengenyam pendidikan formal. Pentingnya pendidikan formal bagi orang suku Bajo Torosiaje pada masa itu belum begitu masif disuarakan. Akan tetapi, tidak berarti semua anak-anak suku Bajo Torosiaje buta huruf. Banyak juga anak-anak suku Bajo mengenyam pendidikan sampai ke perguruan tinggi dan memiliki profesi yang berbeda-beda. Mereka yang dapat mengenyam pendidikan pada umumnya adalah orang-orang yang sudah tercerahkan dengan keadaan. Khususnya anak-anak yang orang tuanya kaya berdasarkan ukuran setempat. Lagi pula, saat ini, di Desa Laut (Torosiaje) sudah tersedia sekolah formal, yaitu satu buah sekolah dasar dan satu buah sekolah menengah pertama. Ditambah lagi satu buah sekolah kejuruan (SMK), walaupun bukan terletak di suku Bajo Laut (Desa Torosiaje) tetapi terletak di suku Bajo Darat. Namun, keberadaan sekolah-sekolah tersebut tidak dapat dimanfaatkan oleh anak-anak Ibu Hare karena yang ada di pikirannya hanya berusaha untuk dapat makan dan hidup hari itu. Oleh sebab itu, anak-anak dari Ibu Hare kebanyakan buta huruf, padahal mereka sudah berumur 17 tahun ke atas pada saat ini.

Pemerintah telah melakukan pembinaan dan program relokasi permukiman. Ada yang berhasil dipindahkan ke darat dan menyatu dengan masyarakat yang ada di sekitar pantai, tetapi banyak di antara mereka lebih memilih tinggal di laut. Ia mengatakan bahwa laut adalah habitatnya, tempat mereka mencari hidup, beraktivitas tanpa berpikir panjang, dan tanpa beban jika tinggal di laut. Mereka juga tidak punya keterampilan lain kecuali mengarungi dan menangkap ikan di laut. Termasuk keluarga Ibu Hare, sama sekali tidak tebersit dalam hati dan pikirannya untuk tinggal di darat, lebih-lebih di kota karena ia menganggap bahwa mencari penghidupan di darat dan kota lebih susah daripada tinggal di laut.

Namun, jika membandingkan beberapa tahun lalu waktu suaminya baru meninggal dengan keadaannya sekarang, ia mengakui bahwa kehidupannya lebih baik saat ini karena anaknya sudah besar dan dapat menggantikan dirinya melaut mencari ikan. Terutama anak ketiganya yang laki-laki, sementara anak pertama dan keduanya sudah menikah. Anak pertamanya perempuan, menikah dengan kerabatnya yang juga tinggal di Torosiaje dan sekarang tinggal serumah dengannya. Keluarga anaknya ini tidak bisa membantunya karena penghasilannya pas-pasan. Demikian juga anak keduanya yang laki-laki, sudah berkeluarga, tetapi tidak bisa juga membantunya karena penghasilannya juga pas-pasan dari kerja serabutan dan bahkan menganggur. Jadi, saat ini hanya anak ketiganyalah yang menopang kehidupan keluarga besarnya.

Anak ketiganya itulah yang setiap hari melaut seorang diri, pergi setiap sore atau menjelang magrib dan pulang pada subuh hari. Ia pergi melaut dengan perahu mungilnya membelah laut dan melawan badai seorang diri. Ia hanya membawa alat tangkap pancing seadanya. Dengan perahu yang sangat kecil dan alat tangkap pancing sederhana maka sudah bisa ditebak hasil tangkap yang akan diperoleh. Benar adanya, hasil tangkap yang ia peroleh hanya sekitar 1 sampai dengan 3 kilogram dan hanya sesekali bisa memperoleh lebih dari 3 kilogram. Harga ikan ketika ia jual hanya Rp20.000,00 per kilogram jadi kalau dirata-ratakan 3 kilogram maka ia memperoleh penghasilan kotor

Rp60.000,00 per hari. Sementara itu, per hari, ia harus membeli bensin antara 2 sampai 3 liter setiap kali melaut dengan harga Rp13.000,00 per liter. Kalau dirata-rata, 2,5 liter per hari, penghasilannya setiap hari hanya Rp27.500,00. Sungguh sangat tidak cukup untuk membiayai keluarga besarnya yang berjumlah empat orang (tiga adik yang belum berkeluarga dan seorang ibu), bahkan menghidupi dua orang kakaknya dan dua orang ipar.

Kondisi keluarga ibu Hare itu akhirnya terdata oleh pemerintah dan mendapat bantuan Bantuan Langsung Tunai (BLT) dan bantuan Program Keluarga Harapan (PKH). Dengan demikian, setiap dua bulan, keluarga Ibu ini mendapat Rp500 ribu menurut keterangan salah seorang aparat Desa Torosiaje dan diakui sendiri oleh Ibu Hare. Bu Hare merasa bersyukur dan berterima kasih kepada pemerintah, mulai pemerintah desa hingga pemerintah pusat. Walaupun mendapat bantuan dari pemerintah, ia merasa masih tidak cukup untuk menutupi semua kebutuhan dan keperluan hidup keluarganya. Di samping biaya hidup pokok sehari-hari 8 orang keluarganya, juga ada pembayaran listrik yang harus terpenuhi setiap bulan, minimal Rp60.000,00 per bulan, kebutuhan papan dan sandang lainnya, termasuk biaya sosial kekeluargaan. Itulah sebabnya, Ibu Hare ikut menjadi buruh pembelah dan pembersih ikan, upahnya Rp3.000,00 per seratus ekor ikan yang berhasil dibelah dan dibersihkan. Sangat beruntung kalau dapat Rp9.000,00 per hari, tetapi itu pun tidak setiap hari ada pekerjaan membelah dan membersihkan ikan.

Keluarga Bu Hare memiliki banyak harapan walaupun tidak memaksakan dirinya, itu tampak ketika ditanya tentang harapan Bu Hare bersama anak-anaknya terhadap kegiatan Regsosek. Ia hanya berharap agar selalu mendapat bantuan BLT dan PKH sebab tanpa bantuan akan makin mempersulit keluarganya untuk menyambung hidup. Ia juga berharap dengan adanya pendataan keluarganya dalam Regsosek, makin memperkuat bahwa keluarganya layak mendapat bantuan. Keluarga Bu Hare layak mendapatkan jaminan sosial sembari mengedukasi dan memberi pemberdayaan secara langsung agar dapat keluar dari subsistensi kemiskinan. Sebagian besar waktunya habis

percuma, sebanyak delapan orang dalam satu keluarga besar, tetapi hanya dua orang yang produktif, khususnya anak laki-laki, dan itu pun tidak maksimal. Sementara itu, mereka tidak begitu tertarik pemberdayaan dan bantuan berupa alat tangkap lain selain pancing, kecuali alat tangkap pancing yang bagus dan banyak mata pancingnya. Itu berarti bahwa keluarga ini memang perlu pendampingan dan edukasi terlebih dahulu sebelum diberdayakan. Di Desa Torosiaje, bukan hanya keluarga Bu Hare yang memiliki kondisi seperti itu, tetapi banyak di antaranya yang memerlukan perhatian dari pemerintah. Dengan demikian, pendataan Regsosek BPS secara serius, menyeluruh, dan nyata secara empiris dapat menjadi *database* dan data tunggal untuk semua kementerian dan lembaga pemerintah dalam proses pemberdayaan dan penanggulangan kemiskinan. Walaupun di sana sini masih ada celah dan kekurangan dari kegiatan Regsosek, tetapi dengan Regsosek pendahuluan ini menjadi dasar untuk pendataan berikutnya sebagai langkah-langkah penyempurnaan.

## Daftar Pustaka

- Arbie, R., & Kalangi, L. (2011, 9–12 Oktober). *Hadrah dalam multikultur masyarakat Jaton di Minahasa Sulawesi Utara sebagai pembentukan karakter bangsa* [Presentasi makalah]. Konferensi Internasional Masyarakat Linguistik Indonesia (KIMLI) 2011, Universitas Pendidikan Indonesia, Bandung.
- Arbie, R., & Kalangi, L. (2012, 27–28 April). *Apresiasi masyarakat terhadap bahasa dan sastra Jaton di Sulawesi Utara dan Gorontalo sebagai wahana pembentukan karakter* [Presentasi makalah]. Seminar Nasional Bulan Sastra 2012, Universitas Negeri Gorontalo, Gorontalo.
- Arini, D. I. D., & Yuliantoro, I. (2019). Persepsi masyarakat pinogu terhadap hutan dan pemanfaatannya. *Jurnal WASIAN*, 6(2), 111–123. <https://doi.org/10.20886/jwas.v6i2.5251>.
- Badan Pusat Statistik. (2021). *Hasil sensus penduduk 2020*. <https://www.bps.go.id/pressrelease/2021/01/21/1854/hasil-sensus-penduduk-2020.html>
- Badan Pusat Statistik. (2022). <https://majalengkakab.bps.go.id/backend/fileMenu/Buku-Pedoman-Pendataan-Lapangan-Regsosek.pdf>



- Biro Humas Kominfotik Gorontalo. (2022). <https://gorontaloprov.go.id/diskominfotik-gorontalo-siap-sukseskan-regsosok-2022/>
- Paramita, S., & Sari, W.P. (2016). Komunikasi lintas budaya dalam menjaga kerukunan antara umat beragama di Kampung Jatun Minahasa. *Jurnal Pekommas*, 1(2), 153–166. <https://jurnal.kominfo.go.id/index.php/pekommas/article/view/2010205>
- Yuliantoro, I, & Wahyuni, N. I. (2020). Persepsi dan adaptasi masyarakat pesisir terhadap perubahan iklim di Desa Sarawet Kabupaten Minahasa Utara. *Jurnal Wasian*, 6(2), 89–99. <https://doi.org/10.20886/jwas.v6i2.4728>